

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

2.1 Sejarah Instansi KPP Pratama Kosambi

Kantor Pelayanan Pratama Kosambi didirikan Pada Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi sering disingkat menjadi KPP Pratama Kosambi, merupakan salah satu unit Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah naungan dan tanggung jawab Kepala Kantor Wilayah (DJP) Banten. Sebelumnya Kantor ini dikenal sebagai Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), yang bertugas sebagai pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jendral Pajak (DJP), KPP memiliki peran yang sangat penting yang sangat penting dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Selain itu KPP juga berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak (WP), untuk memastikan keberlangsungan,kepatuhan serta kelancaran administrasi perpajakan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.01/2020 tanggal 23 November 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak (DJP), KPP Pratama Kosambi mengalami penambahan wilayah Kerja sebanyak 5 (Lima) Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kerja KPP Pratama Tigaraksa. Kelima Kecamatan Tersebut antara lain Mekar Baru, Gunung Kaler, Kronjo, Kresek, dan Sukamulya.

Berikut Adalah Logo dari Instansi KPP Pratama Kosambi



Gambar 2.1 Logo Instansi KPP Pratama Kosambi

Sumber : WWW.Pajak.go.id

Berikut Adalah Gambar Wilayah Kerja Kantor pelayanan Pajak Pratama Kosambi



Gambar 2.2 Wilayah Kerja Instansi KPP Pratama Kosambi

Sumber: WWW.pajak.go.id

Wilayah Kerja KPP Pratama Kosambi Meliputi 16 (Enam Belas) Kecamatan di Kabupaten Tangerang yaitu Pasar Kemis, Sidang Jaya, Rajeg, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Teluk Naga, Kosambi, Kemiri, Mekar Baru, Gunung Kaler, Kronjo, kresek dan Sukamulya. Sebagian besar daerahnya dominan dataran rendah dan memiliki pesisir pantai di sepanjang bagian utara. Wilayah kerja KPP Pratama Kosambi berbatasan dengan Kota Jakarta di sisi timur, Kota Tangerang di sisi selatan, Kabupaten Serang di sisi barat, dan Laut Jawa di sisi utaranya.

2.2 Struktur Organisasi KPP PRATAMA KOSAMBI

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya adalah kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Dalam struktur organisasi mengetahui tugas yang harus dipelajari saat melakukan pekerjaan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini dapat dalam salah satu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian lainnya.

Melalui struktur organisasi, sebuah perusahaan dapat memetakan dan mendistribusikan tugas kepada berbagai individu atau divisi sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Hal ini bertujuan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif, tanpa adanya tumpang tindih tugas atau kebingungan dalam pelaksanaannya. Pembagian tugas yang terstruktur juga membantu menciptakan sistem kerja yang lebih terorganisir, sehingga setiap individu mengetahui tanggung jawab yang harus mereka emban dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam Melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Kosambi Menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- i. pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- j. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara

jabatan;

- k. pemeriksaan pajak;
- l. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- m. penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- n. penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- o. penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- p. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- q. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- r. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- s. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Kosambi memiliki struktur organisasi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian, Keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen non perpajakana, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

B. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data

perpajakan.

C. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas untuk melakukan analisa, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian pelayanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak (WP) memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

D. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

E. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu

kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Berikut adalah gambar Struktur Organisasi.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Instansi KPP Pratama Kosambi

Sumber Data : WWW.pajak.go.id

2.3 Kegiatan Umum Instansi KP Pratama Kosambi

Kegiatan operasional KPP Pratama Kosambi semua dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB. KPP Pratama Kosambi utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang. Berikut uraian kegiatan yang ada di KPP Pratama Kosambi.

A. Pelayanan Wajib Pajak

Dalam hal ini, KPP membantu wajib pajak dalam proses pendaftaran atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, KPP juga melayani penerbitan berbagai surat keterangan seperti Surat K Fiskal (SKF) serta memberikan konsultasi perpajakan untuk pertanyaan atau keraguan wajib pajak terkait hak dan kewajiban. Kegiatan ini mencakup pula bimbingan

dalam pengisian dan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun masa.

B. Pengawasan Kepatuhan Pajak

Pengawasan ini dilakukan dengan memonitor pelaporan SPT wajib pajak, memantau transaksi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan, serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran. Langkah-langkah yang diambil bisa berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak (STP), hingga Surat Ketetapan Pajak (SKP).

C. Pengumpulan Dan Penagihan Pajak

KPP Memaikan peran yang sangat penting dengan memastikan bahwa pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak disetorkan tepat waktu. Apabila terdapat tunggakan KPP dapat melaksanakan penagihan melalui mekanisme seperti penerbitan Surat Paksa penyitaan aset, hingga pelelangan jika diperlukan. Semua proses ini bertujuan untuk menjaga agar penerimaan negara tetap optimal.

D. Penyuluhan dan Edukasi

Di mana kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak melalui seminar, pelatihan, dan sosialisasi, KPP memberikan pemahaman yang lebih baik kepada wajib pajak terkait kebijakan atau aturan baru. Kegiatan ini sering kali dilengkapi dengan distribusi buku panduan, brosur, dan materi edukasi lainnya.

E. Pemeriksaan Pajak

Untuk Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

F. Pendukung Administrasi Pajak

SeAdministrasi yang tertata rapi dan penerapan teknologi in modern seperti aplikasi e-Filing, e-Billing, dan e-SPT. Hal ini memun KPP untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dar kepada wajib pajak.

2.3.1 Visi, Misi dan Tujuan KPP Pratama Kosambi selaras dengan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Pajak

I. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi:

- Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

II. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

III. Tujuan Direktorat Jenderal Pajak

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 - 2024 yaitu

1. pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. penerimaan negara yang optimal;
3. birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

